

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 6, No. 2, September 2015

ISSN: 2087-2054

Effect of Capital Structure to Profitability on Textile and Garment Industry Company Listed on The Indonesia Stock Exchange 2010-2012

Rosmiaty Tarmizi & Allansyah Pratama

The Effect Of Size Company, Profitability, Financial Leverage and Dividend Payout Ratio on Income Smoothing in The Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2010-2013

Yunus Fiscal & Agatha Steviany

Analysis Procedure For Credit in Efforts to Minimize Non Performing Loans on PT. Bank Lampung

Aminah & Andi Darmawijaya

Effect of Firm Size and Corporate Governance Practice Earning Management

Chairul Anwar & Damabrata Anugrah

Effect of Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) to Profitability in Textile and Garment Industry Listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013

Khairudin & Erena Dewi

Pengaruh Kinerja Keuangan DER dan ROE Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI (Periode 2009-2013)

Syamsu Rizal & Fira Permatasari

The Effect Of The Characteristics Of The Company On The Disclosure Of Corporate Social Responsibility (Empirical Studies On The Coal Industry Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2011-2013)

Indrayenti & Velycia

Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013)

Herry Goenawan Soedarsa & Apri Irianti Raharjo

Analisis Efektivitas Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

Haninun & Mauli Luzia Eka Safitri

Pengaruh Efektivitas Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen Pada PT. PDAM Way Rilau Bandar Lampung

Angrita Denziana & Erlin Handayani

Factors Affecting Capital Structure In Manufacturing Companies Go-Public In Indonesia Stock Exchange In The Year 2011-2013

Riswan & Nina Permata Sari

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 6, No. 2, September 2015

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.

Penanggung Jawab

Dra. Rosmiaty Tarmizi, M.M.Akt. C.A

Pimpinan Redaksi

Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M, Ak. C.A

Sekretaris Redaksi

Aminah, S.E., M.S.Ak
Khairudin, S.E., M.S.Ak

Penyuting Ahli

Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, M.B.A. (Universitas Gadjah Mada)
Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt. (Universitas Lampung)
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telaah teoritis konseptual yang kritis dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung G- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 6, No. 2, September 2015

ISSN: 2087-2054

Effect of Capital Structure to Profitability on Textile and Garment Industry Company Listed on The Indonesia Stock Exchange 2010-2012

Rosmiaty Tarmizi & Allansyah Pratama

The Effect Of Size Company, Profitability, Financial Leverage and Dividend Payout Ratio on Income Smoothing in The Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2010-2013

Yunus Fiscal & Agatha Steviany

Analysis Procedure For Credit in Efforts to Minimize Non Performing Loans on PT. Bank Lampung

Aminah & Andi Darmawijaya

Effect of Firm Size and Corporate Governance Practice Earning Management

Chairul Anwar & Damabrata Anugrah

Effect of Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) to Profitability in Textile and Garment Industry Listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013

Khairudin & Erena Dewi

Pengaruh Kinerja Keuangan DER dan ROE Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI (Periode 2009-2013)

Syamsu Rizal & Fira Permatasari

The Effect Of The Characteristics Of The Company On The Disclosure Of Corporate Social Responsibility (Empirical Studies On The Coal Industry Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2011-2013)

Indrayenti & Velycia

Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan *Net Profit Margin* (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013)

Herry Goenawan Soedarsa & Apri Irianti Raharjo

Analisis Efektivitas Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

Haninun & Mauli Luzia Eka Safitri

Pengaruh Efektivitas Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen Pada PT. PDAM Way Rilau Bandar Lampung

Angrita Denziana & Erlin Handayani

Factors Affecting Capital Structure In Manufacturing Companies Go-Public In Indonesia Stock Exchange In The Year 2011-2013

Riswan & Nina Permata Sari

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 6, No. 2, September 2015

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Effect of Capital Structure to Profitability on Textile and Garment Industry Company Listed on The Indonesia Stock Exchange 2010-2012 <i>Rosmiaty Tarmizi & Allansyah Pratama</i>	1-10
The Effect Of Size Company, Profitability, Financial Leverage and Dividend Payout Ratio on Income Smoothing in The Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2010-2013 <i>Yunus Fiscal & Agatha Steviany</i>	11-24
Analysis Procedure For Credit in Efforts to Minimize Non Performing Loans on PT. Bank Lampung <i>Aminah & Andi Darmawijaya</i>	25-46
Effect of Firm Size and Corporate Governance Practice Earning Management <i>Chairul Anwar & Damabrata Anugrah</i>	47-63
Effect of Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) to Profitability in Textile and Garment Industry Listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013 <i>Khairudin & Erena Dewi</i>	65-77
Pengaruh Kinerja Keuangan DER dan ROE Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI (Periode 2009-2013) <i>Syamsu Rizal & Fira Permatasari</i>	79-95
The Effect Of The Characteristics Of The Company On The Disclosure Of Corporate Social Responsibility (Empirical Studies On The Coal Industry Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2011-2013) <i>Indrayenti & Velycia</i>	97-124
Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan <i>Net Profit Margin</i> (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013) <i>Herry Goenawan Soedarsa & Apri Irianti Raharjo</i>	125-135
Analisis Efektivitas Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah <i>Haninun & Mauli Luzia Eka Safitri</i>	137-149
Pengaruh Efektivitas Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen Pada PT. PDAM Way Rilau Bandar Lampung <i>Angrita Denziana & Erlin Handayani</i>	151-176
Factors Affecting Capital Structure In Manufacturing Companies Go-Public In Indonesia Stock Exchange In The Year 2011-2013 <i>Riswan & Nina Permata Sari</i>	177-201

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 6, No. 2, September 2015

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada *The Indonesian Journal of Accounting Research*, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede *et al.*, 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:

- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
- b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
- c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evansto, IL.
- d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
- e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
- f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
- g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
- h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. *Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi*, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.

12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH

Haninun

Mauli Luzia Eka Safitri

(Universitas Bandar Lampung)

E-Mail: haninun@ubl.ac.id

Abstract

33 provinces and 471 districts / cities in Indonesia, only about 10 percent of which have a formal setting boundaries one Lampung province has 15 districts / cities. Lampung Province has other sources of income and abundant natural resources in each region. Therefore, this study aims to demonstrate empirically the effectiveness of Local Revenue Target Achievement At Regency / City in Lampung. The object of this study was 15 District / City in the province of Lampung. The data used in this study is that the data collected in 2010 to 2012. The data analyzed in this study are secondary data obtained from documents Budget Realization Report Regency / City in Lampung Province obtained from the Board of Finance of the Republic of Indonesia Representative Pemerika Lampung Province. Budget Realization of this report was obtained data on the number of actual revenue (PAD). The sampling method using census method by taking the entire population. From these data, then analysis by using the calculation of the ratio of the degree of decentralization, the ratio of financial independence and effectiveness ratio. The results of this study indicate that the Budget Actual revenue (PAD) Lampung Province from 2010-2012 has been very effective. That means the regional government to realize the budget revenue (PAD) properly.

Keywords: revenue (PAD), Budget Realization Report (LRA).

1. Latar Belakang

Penyusunan anggaran pendapatan daerah merupakan salah satu dokumen rencana kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itulah yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerahnya. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai, Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja.

Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak hanya keinginan untuk melimpahkan keuangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (publik), memudahkan masyarakat untuk untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi yang pada intinya adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatif. Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris analisis efektifitas pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

Definisi Anggaran Pendapatan

Anggaran Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2006).

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) (Pratiwi, 2007).

Kriteria Anggaran

Menurut Bastian (2001) Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan provinsi seharusnya dapat memenuhi kriteria berikut :

1. Anggaran harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Anggaran harus dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat perencanaan (planning tool) Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang akan dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
 - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
 - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Sebagai alat pengendalian (controlling tool)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu :

 - a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,
 - b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances),
 - c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians,
 - d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool)

Anggaran sebagai alat kebijakn fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakn fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Sebagai alat politik (political tool)

Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

5. Sebagai alat koordinasi dan komuniksai (coordination and communication tool)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Sebagai alat penilaian kinerja (performance measurement tool)

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Sebagai alat pemotivasi (motivation tool)

Sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisiensi dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere)

Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran sektor publik merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan target, tujuan dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan di capai dan keterkaitan

tujuan dengan berbagai program yang akan di lakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai di lakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering di abaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian,2006).

Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Kemampuan Pemerintah Daerah dikategorikan efektif apabila :

Tabel 1
Tolak Ukur Rasio Efektifitas

Persentase (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90%-100%	efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

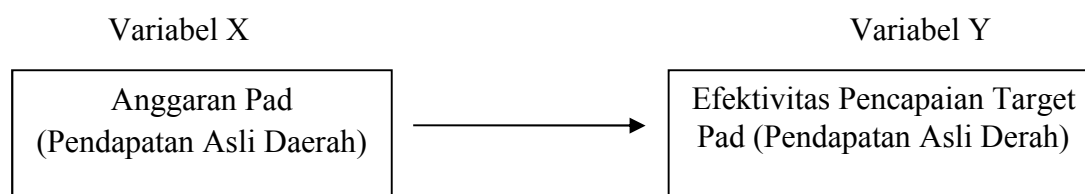
Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik. Efektivitas kemampuan Pemerintah

2.2 Penelitian Terdahulu

Kusumawati (2011) meneliti tentang Rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan. Rasio efektifitas tahun lalu tidak berpengaruh positif terhadap PAD tahun berjalan dan rasio efisiensi tahun lalu tidak berpengaruh negatif terhadap PAD tahun berjalan. PAD tahun berjalan berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berjalan. Rasio kemandirian tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan. Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal tahun berjalan.

Iskandar (2004) mengkaji keterkaitan antara perkembangan penerimaan asli daerah dengan perkembangan produk domestik regional bruto di provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisisnya dapat diketahui bahwa perkembangan PDRB DKI Jakarta teridentifikasi berpengaruh signifikan terhadap perkembangan penerimaan PAD.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Unit Analisis

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota.

Unit Analisis

Unit Analisis dalam penelitian ini meliputi seluruh populasi yaitu seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2010-2012 dengan data penelitian sebanyak 15 kabupaten/kota.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Data penelitian berupa Laporan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010-2012 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat data-data yang berhubungan dengan penelitian yaitu sebanyak 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3.4 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel x (dependen) dan y (independen). Dimana dalam penelitian ini, satu komponen dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap efektivitas pencapaian target pendapatan asli daerah sebagai variabel independen Target

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, berupa uraian data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Sementara itu penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (Moleong,2007).

Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh anggaran pendapatan daerah secara empiris. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam keefektivan pencapaian target pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung (Moleong,2007).

4. Pembahasan

4.1 Perhitungan dan Analisis Rasio Keuangan

Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, berikut ini adalah skala pengukuran derajat desentralisasi :

Tabel 2
Tolak Ukur Derajat Desentralisasi

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,02-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : (Anita, 2001)

Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung secara keseluruhan pada Tahun 2010-2012. Ini menunjukkan kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat untuk menggali, mengelola pendapatan dan membiayai rumah tangganya sendiri masih dilakukan dengan sangat kurang baik. Untuk itu ke depannya diharapkan agar dapat lebih berupaya untuk meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada.

Tabel 3
Derajat Desentralisasi Provinsi Lampung
Tahun 2010-2012

Tahun	Rasio Derajat Desentralisasi	Keterangan
2010	50,0 %	Sangat baik
2011	54,86 %	Sangat baik
2012	44,79 %	Baik

Sumber : Data di olah, 2015

Dari perhitungan di atas dapat dilihat Derajat Desentralisasi Provinsi Lampung pada Tahun 2010-2012. Ini berarti kewajiban dan kewenangan pemerintah pusat untuk menggali, mengelola pendapatan dan membiayai rumah tangganya sendiri telah dilakukan dengan baik. Untuk itu ke depannya pemerintah pusat Provinsi Lampung agar dapat lebih berupaya untuk meningkatkan PAD nya baik dengan menggali potensi baru ataupun mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada.

b. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001).

Tabel 4
Tolak Ukur Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase (%)	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,02-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Widodo, 2001). Rasio kemandirian keuangan per-Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-2012, hal ini tentu menggambarkan kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang masih sangat kurang, namun untuk Kota sudah sangat baik dengan mampu mencapai tingkat kemandirian yang tinggi apalagi kemampuannya berada diatas 100 %.

Tabel 5
Kemandirian Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2010-2012

Tahun	Rasio Kemandirian	Keterangan
2010	105,15 %	Sangat Baik
2011	124,39 %	Sangat Baik
2012	130,12 %	Sangat Baik

Sumber : Data di olah, 2015

Pada tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian keuangan Provinsi Lampung pada Tahun 2010-2012, hal ini tentu menggambarkan kemampuan Provinsi Lampung yang sangat baik dengan mampu mencapai tingkat kemandirian yang tinggi apalagi kemampuannya berada di atas 100 %.

c. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan rasio efektivitas PAD yang di capai oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) masing-masing Kabupaten dan Kota serta Provinsi Lampung. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan dengan rata-rata 96,81 % . Hal ini menggambarkan kinerja yang sangat baik.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan dengan rata-rata 116,16 % . Hal ini menggambarkan kinerja yang sangat baik. Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan dengan rata-rata 108,29 % . Hal ini menggambarkan kinerja yang sangat baik.

Tabel 6
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung
Tahun 2010-2012

Tahun	Rasio efektivitas (%)	Keterangan
2010	109,61	Sangat Efektif
2011	108,21	Sangat Efektif
2012	88,92	Cukup Efektif

Sumber: Data di olah, 2015

Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah Provinsi Lampung yang direncanakan. Hal ini menggambarkan kinerja yang sangat baik.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

- 1) Penyusunan anggaran atau rencana anggaran yang baik akan sangat mempengaruhi keefektivan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian di Provinsi Lampung dilihat dari produktivitas, keberhasilan merealisasikan PAD dari target yang ditetapkan pada Tahun 2010-2012 sudah sangat baik.

- 2) Faktor-faktor yang menghambat keefektivan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah antara lain : 1) Ciri organisasi yang dilihat dari tujuan organisasi, struktur organisasi, pembagian kerja dan penggunaan teknologi masih belum optimal meskipun tujuan organisasi telah ditetapkan, dan struktur yang ada sudah membagi habis tugas dan fungsi dan kewenangan pada masing-masing bidang namun dalam pelaksanaannya kewenangan dan fungsi tersebut belum berjalan dengan baik. 2) Kebijakan dan praktek manajemen pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung agar lebih optimal, bisa berupa motivasi dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Selain itu rapat rutin secara berkala untuk membahas permasalahan yang ada dan bagaimana mencapai tujuan atau target PAD yang telah ditetapkan.
- 3) Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Provinsi Lampung sudah cukup baik, kemandirian keuangan Provinsi Lampung bahkan sangat baik, dengan tidak adanya pinjaman dengan Pemerintah Pusat dan tidak pula memberi pinjaman pada Kabupaten. Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah diatas 100%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah, beberapa hal yang harus dilakukan adalah : 1) Perlu ditingkatkan pemanfaatan teknologi untuk pendataan dan penghitungan potensi pendapatan daerah dan harus segera disusun perencanaan program kerja jangka menengah dan jangka panjang, dengan melibatkan dinas-dinas terkait untuk memaksimalkan potensi-potensi PAD yang ada. 2) Guna meningkatkan produktivitas Dispenda, kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan pembentukan tim intensifikasi PAD harus dimaksimalkan antara lain dengan melakukan penyusunan data potensi real pajak dan retribusi daerah serta menciptakan potensi PAD baru salah satunya dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang potensial antara lain sektor usaha perdagangan dan Pariwisata. 3) untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai perlu ditingkatkan

fasilitas kerja pegawai (ruang kerja dan sarana prasarana kerja), serta penerapan pemberian insentif berdasarkan kinerja atau beban kerja yang diberikan pada masing-masing pegawai.

- 2) Untuk mewujudkan efektivitas organisasi yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas disarankan antara lain 1) Dilakukan pembenahan dan penataan manajemen kerja guna memaksimalkan struktur dan fungsi organisasi yang ada. Untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja mencapai tujuan organisasi perlu dilakukan pertemuan rutin dan berkala guna membahas kemajuan pencapaian tujuan dan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Isdijoso, Brahmantio. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Sektor Pendidikan Kota Surakarta) dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iskandar. 2004. *Analisis perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta*.
- Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusumawati. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*.
- Lexy J, Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo.2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Andi.
- Rahmawati. 2010. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah pada kabupaten/kota di jawa tengah*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang nomor 17 tahun 2003, menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. 2007. *Permendagri nomor 59 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah.*

Republik Indonesia. 1996. *Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*

Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

www.jpnn.com/read/2014/03/01/219406/dugaan-penyimpangan-anggaran-di-lampung-rp-882-miliar. 30 Oktober 2014, 21.56 WIB

www.news.detik.com/read/2014/03/01/050134/2512166/10/2399-kasus-dugaan-penyimpangan-anggaran-terjadi-di-aceh. 30 Oktober 2014, 21.51 WIB